

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Pertumbuhan wilayah merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai aspek dan faktor yang saling terkait. Definisi pertumbuhan wilayah dapat dipahami melalui beberapa dimensi, seperti pertumbuhan ekonomi, demografi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Pencapaian tujuan pembangunan nasional memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai sektor, seperti ekonomi, lingkungan, transportasi, dan lainnya. Koordinasi ini juga melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.

Buku ini membahas tentang Konsep Pengembangan Kewirausahaan, Analisis Peluang dan Faktor Risiko dalam Pengembangan kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi dalam Pengembangan Kewirausahaan, Karakteristik Produk dalam Pengembangan UMKM, Strategi Pemasaran Usaha Baru, Strategi Entrepreneurship di Indonesia, Model Pengusaha di Indonesia.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERKOTAAN DI INDONESIA

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERKOTAAN DI INDONESIA



Ade Putra Ode Amane, Isa Ayu Fatimah, Siti Fadjarajani, Bulan Suci Ramadhani,
Kukuh Destanto, Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, Rully N. Wurarah, Vera Arida,
Mendra Wijaya, Mailendra, Jhonatan Saragih, Tengku Muhammad Sahudra, Budi Witjaksana,
Ruslina Dwi Wahyuni, Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, Ar. Nurmiah

**PENGEMBANGAN WILAYAH
DAN PERKOTAAN
DI INDONESIA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Ade Putra Ode Amane
Isa Ayu Fatimah
Siti Fadjarajani
Bulan Suci Ramadhani
Kukuh Destanto
Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti
Rully N. Wurarah
Vera Arida,
Mendra Wijaya
Mailendra
Jhonatan Saragih
Tengku Muhammad Sahudra
Budi Witjaksana
Ruslina Dwi Wahyuni
Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti
Ar. Nurmiah



PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Penulis:

Ade Putra Ode Amane, Isa Ayu Fatimah, Siti Fadjarajani, Bulan Suci Ramadhani, Kukuh Destanto, Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, Rully N. Wurarah, Vera Arida, Mendra Wijaya, Mailendra, Jhonatan Saragih, Tengku Muhammad Sahudra, Budi Witjaksana, Ruslina Dwi Wahyuni, Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, Ar. Nurmiah

Editor:

Andi Asari, M.A.

Desainer: Mafy Media

Sumber Gambar Cover: www.freepik.com

Ukuran:

viii, 251 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8506-60-6

Cetakan Pertama:

Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Pengembangan Kewirausahaan, Analisis Peluang dan Faktor Risiko dalam Pengembangan kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi dalam Pengembangan Kewirausahaan, Karakteristik Produk dalam Pengembangan UMKM, Strategi Pemasaran Usaha Baru, Strategi Entrepreneurship di Indonesia, Model Pengusaha di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 9 Desember 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONSEP DASAR KEWILAYAHAN	1
Pendahuluan	1
Geografi Fisik	2
Geografi Manusia	5
Ekonomi	14
Sosial Dan Budaya	15
Lingkungan	19
Daftar Pustaka	21
BAB II PERTUMBUHAN WILAYAH	27
Definisi Pertumbuhan Wilayah	27
Teori Kutub Pertumbuhan	29
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Wilayah	30
Masa Depan Pertumbuhan Wilayah	32
Daftar Pustaka	35

BAB III RUANG PEMBANGUNAN NASIONAL -----	39
Konsep Dasar Ruang Pembangunan Nasional-----	39
Visi Dan Misi Pembangunan Nasional -----	41
Infrastruktur Dan Pembangunan Fisik -----	42
Tantangan Dan Hambatan -----	44
Inovasi Dan Strategi Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Pembangunan -----	46
Daftar Pustaka-----	50
BAB IV URBANISASI -----	54
Konsep Dasar Urbanisasi -----	54
Faktor Penarik Dan Pendorong Urbanisasi -----	55
Pola Urbanisasi -----	57
Dampak Urbanisasi -----	59
Cara Mengatasi Permasalahan Urbanisasi -----	65
Daftar Pustaka-----	67
BAB V PERTUMBUHAN PENDUDUK PERKOTAAN -----	70
Konsep Dasar Pertumbuhan Penduduk -----	70
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk-----	72
Teori-Teori Pertumbuhan Penduduk Perkotaan -----	74
Daftar Pustaka-----	80
BAB VI PERUBAHAN DESA MENJADI KOTA -----	82
Definisi Desa -----	82
Definisi Kota -----	83
Faktor-Faktor Perubahan Desa Menjadi Kota -----	83
Proses Perubahan-----	86
Tantangan Sosial -----	88
Daftar Pustaka-----	91

BAB VII PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA -----	94
Pendahuluan -----	94
Pembahasan Berdasarkan Konsep Teori -----	96
Kesimpulan -----	101
Daftar Pustaka -----	104
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA WILAYAH KOTA -----	106
Definisi Sarana Dan Prasarana Kota -----	106
Dasar Pertimbangan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota -	107
Komponen Prasarana Kota -----	108
Penyediaan Prasarana Kota -----	111
Permasalahan Prasarana Kota -----	113
Daftar Pustaka -----	116
BAB IX LINGKUNGAN HIDUP -----	120
Pendahuluan Lingkungan Hidup -----	120
Tantangan Lingkungan Hidup -----	122
Konservasi Sumber Daya Alam -----	123
Upaya Pemulihan Lingkungan -----	124
Keterkaitan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan ----	126
Tantangan Global Dan Peran Indonesia -----	127
Daftar Pustaka -----	130
BAB X PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN -----	135
Pendahuluan -----	135
Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan -----	139
Membangun Kerjasama Kemitraan -----	141
Kebijakan Pembiayaan Perumahan -----	144
Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman -----	146
Penutup -----	147

Daftar Pustaka -----	149
BAB XI PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA -----	155
Sejarah Singkat Penataan Ruang Di Indonesia -----	155
Sistem Perencanaan Tata Ruang Di Indonesia -----	160
Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Indonesia -----	165
Urgensi Perencanaan Tata Ruang Dalam Pengembangan Wilayah Dan Kota Di Indonesia -----	166
Daftar Pustaka -----	170
BAB XII MANAJEMEN KOTA DI INDONESIA -----	173
Pendahuluan -----	173
Isu Dan Tantangan Manajemen Kota Di Indonesia -----	175
Kepemimpinan Kreatif Dalam Manajemen Kota -----	180
Pentup -----	182
Daftar Pustaka -----	183
BAB XIII TUGAS PENGELOLAAN KOTA -----	185
Manajemen Kota -----	185
Lembaga Pengelola Kawasan Kota -----	186
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kota -----	187
Daftar Pustaka -----	189
BAB XIV AKTOR MANAJEMEN KOTA DI INDONESIA -----	191
Pendahuluan -----	191
Latar Belakang -----	192
Aktor Manajemen Kota Di Indonesia -----	192
Kolaborasi Dan Koordinasi Antar Aktor-Aktor Manajemen Kota Di Indonesia -----	205
Kesimpulan -----	207

Uraian Penutup-----	208
Daftar Pustaka-----	209

BAB XV PERAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL -----	213
Pengertian Kepala Daerah -----	213
Jenis-Jenis Kepala Daerah Di Indonesia -----	214
Peran Kepala Daerah -----	216
Kesimpulan -----	222
Daftar Pustaka-----	223

BAB XVI PERAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL -----	227
Pentingnya Peran Presiden Dalam Pembangunan Nasional -----	227
Visi Dan Misi Presiden Untuk Pembangunan Nasional -----	228
Kebijakan Pembangunan Yang Diperkenalkan Presiden -----	229
Peran Presiden Dalam Membangun Hubungan Internasional Yang Mendukung Pembangunan Nasional. -----	232
Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Nasional -----	233
Daftar Pustaka-----	235

BAB XVIII KOTA-KOTA BARU-----	239
Daftar Pustaka-----	252



BAB I

KONSEP DASAR KEWILAYAHAN

OLEH: ADE PUTRA ODE AMANE

PENDAHULUAN

Konsep dasar kewilayahan mengacu pada pemahaman tentang aspek-aspek geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berkaitan dengan suatu wilayah geografis tertentu. Pemahaman tentang kewilayahan penting dalam perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya alam, kebijakan publik, dan dalam memahami dinamika sosial ekonomi suatu daerah. Berikut adalah beberapa konsep dasar kewilayahan: (Wahyudi, 2018); (Amane, Febriana, *et al.*, 2023); (Hasan *et al.*, 2023);

GEOGRAFI FISIK

Iklim dan Cuaca: Pengaruh iklim terhadap ekosistem dan kehidupan manusia.

Iklim dan cuaca memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaruh iklim terhadap ekosistem dan manusia: Pengaruh Iklim terhadap Ekosistem: (Rudito *et al.*, 2016)

1. **Keanekaragaman Hayati:** Iklim mempengaruhi tipe-tipe vegetasi dan hewan yang dapat hidup dalam suatu wilayah. Daerah dengan iklim tropis mungkin memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah beriklim gurun.
2. **Pertanian:** Iklim mempengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam dan dipelihara. Tanaman padi, misalnya, membutuhkan curah hujan yang cukup, sementara tanaman gurun seperti kaktus mampu bertahan dengan sedikit air.
3. **Ketersediaan Air:** Curah hujan dan pola curah hujan mempengaruhi ketersediaan air tanah dan sungai, yang sangat penting untuk ekosistem dan kehidupan manusia.
4. **Keragaman Ekosistem:** Iklim memengaruhi bentuk dan keragaman ekosistem, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, dan ekosistem laut.
5. **Keseimbangan Ekosistem:** Perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mempengaruhi spesies-spesies tertentu dan memicu perubahan dalam rantai makanan.

Pengaruh Iklim terhadap Kehidupan Manusia: (Tjondronegoro Soediono M.P, 2008)

1. **Kesejahteraan Pertanian:** Petani sangat bergantung pada pola cuaca dan curah hujan. Musim kemarau yang panjang atau banjir yang berlebihan dapat menghancurkan hasil pertanian.

2. Kesehatan: Iklim mempengaruhi penyebaran penyakit. Iklim yang hangat dan lembab sering kali mendukung pertumbuhan patogen dan nyamuk pembawa penyakit.
3. Bencana Alam: Iklim memainkan peran penting dalam bencana alam seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas, yang dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak infrastruktur.
4. Energi: Sumber energi seperti listrik dan panas sering kali dipengaruhi oleh iklim. Misalnya, tenaga surya lebih efisien di daerah yang mendapat sinar matahari banyak sepanjang tahun.
5. Migrasi dan Pengungsi: Perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global, dapat memaksa orang untuk berpindah tempat karena daerah tempat tinggal mereka terancam oleh banjir.

Pemahaman yang mendalam tentang pola iklim dan cuaca sangat penting untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alam, serta untuk mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Topografi: Ciri-ciri permukaan bumi, seperti gunung, lembah, dan dataran.

Topografi merujuk pada ciri-ciri permukaan bumi, termasuk bentuk, elevasi, dan fitur-fitur geografis seperti gunung, lembah, dataran, dan sungai. Pengetahuan tentang topografi sangat penting karena memengaruhi iklim, hidrologi, vegetasi, dan penggunaan lahan di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa konsep penting terkait topografi: (Anggara, 2012); (Gai, Witjaksono and Maulida, 2020)

1. Gunung, Lembah, dan Dataran:
 - a. Gunung: Bentuk tanah yang mencapai ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Gunung-gunung dapat mempengaruhi pola cuaca karena mereka menghadang aliran udara yang membawa kelembaban.

- b. Lembah: Area rendah di antara pegunungan atau bukit. Lembah-lembah sering kali memiliki tanah yang subur dan digunakan untuk pertanian.
 - c. Dataran: Wilayah dengan elevasi rendah dan tanah yang datar. Dataran sering kali merupakan tempat-tempat yang subur dan padat penduduk karena kemudahan pembangunan dan aksesibilitas.
2. Sungai dan Drainase:
- a. Sungai: Aliran air permanen yang mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Sungai memainkan peran penting dalam distribusi air, pertanian, transportasi, dan kehidupan manusia.
 - b. Drainase: Sistem alamiah yang membuang air ke sungai atau danau. Drainase yang baik penting untuk mencegah banjir dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan.
3. Pegunungan dan Dataran Rendah:
- a. Pegunungan: Wilayah dengan elevasi tinggi dan cenderung memiliki iklim yang lebih dingin. Mereka mempengaruhi pola curah hujan dan memberikan tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna.
 - b. Dataran Rendah: Wilayah yang cenderung datar dengan elevasi yang rendah. Dataran rendah sering kali digunakan untuk pertanian intensif dan pembangunan perkotaan.
4. Pantai dan Pulau:
- a. Pantai: Area peralihan antara daratan dan laut. Pantai dapat mengalami erosi dan mempengaruhi kehidupan manusia yang tinggal di daerah pesisir.
 - b. Pulau: Tanah yang dikelilingi oleh air di semua sisi. Pulau-pulau memiliki ekosistem unik dan memainkan peran penting dalam keseimbangan ekologi laut.

Pengetahuan tentang topografi suatu wilayah membantu dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan bencana alam, dan pemahaman tentang potensi alamiah dan pembatasan suatu

daerah. Selain itu, topografi juga mempengaruhi aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, penggunaan lahan, dan distribusi populasi.

Hidrologi: Sistem sungai, danau, dan sumber air lainnya.

GEOGRAFI MANUSIA

Geografi Manusia adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan mereka dan bagaimana manusia mempengaruhi dan membentuk dunia di sekitar mereka. Fokus utama geografi manusia adalah pada aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik manusia serta distribusi populasi, pemukiman, dan aktivitas manusia lainnya di permukaan bumi. Beberapa topik utama dalam geografi manusia termasuk: (Amane, Mutolib, *et al.*, 2023); (Mansyur *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.*, 2023)

Populasi: Jumlah, distribusi, pertumbuhan, dan karakteristik penduduk.

Populasi merujuk pada jumlah total individu dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Studi tentang populasi melibatkan analisis tentang jumlah, distribusi, pertumbuhan, dan karakteristik penduduk. Mari jelaskan setiap elemen tersebut lebih lanjut:

1. **Jumlah Penduduk:** Jumlah penduduk mencerminkan total individu dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Ini melibatkan perhitungan total jumlah orang, yang penting untuk perencanaan sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
2. **Distribusi Penduduk:** Distribusi penduduk merujuk pada cara individu tersebar di suatu wilayah. Ini dapat mencakup pemahaman tentang populasi yang tinggal di kota versus pedesaan, distribusi geografis, dan sebaran usia serta jenis kelamin.
3. **Pertumbuhan Penduduk:** Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan dalam jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Ini melibatkan faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan imigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan.

4. **Karakteristik Penduduk:** Ini melibatkan analisis tentang sifat-sifat penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial-ekonomi. Pengetahuan tentang karakteristik ini penting untuk merencanakan kebijakan publik, mengidentifikasi kebutuhan sosial, dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan populasi tertentu.

Studi tentang populasi adalah inti dari ilmu demografi. Demografi membantu pemerintah, organisasi internasional, dan peneliti untuk memahami dinamika populasi, meramalkan tren masa depan, dan merencanakan kebijakan yang berkaitan dengan penduduk. Data populasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik penduduk sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Pemukiman: Pola pemukiman, perkotaan, dan pedesaan.

Studi tentang pemukiman melibatkan analisis tentang pola dan jenis tempat tinggal manusia. Ini melibatkan penelitian tentang pola pemukiman, baik itu di wilayah perkotaan (urban) maupun di wilayah pedesaan. Mari jelaskan setiap elemen tersebut lebih lanjut:

1. **Pola Pemukiman:** Pola pemukiman mengacu pada susunan spasial manusia di suatu wilayah. Ada beberapa jenis pola pemukiman, termasuk pemukiman berkelompok, pemukiman tersebar, dan pemukiman linier. Pemukiman berkelompok adalah ketika rumah-rumah terkonsentrasi dalam area yang relatif kecil, sementara pemukiman tersebar adalah ketika rumah-rumah terletak di area yang lebih luas. Pemukiman linier adalah ketika rumah-rumah terletak sepanjang jalur tertentu, seperti sepanjang jalan atau sungai.

2. Perkotaan (Urban) dan Pedesaan (Rural): (Guampe *et al.*, 2022); (Amane, Hutajulu, *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023); (Bormasa *et al.*, 2023); (Salampessy *et al.*, 2023)
 - a. Perkotaan (Urban): Wilayah perkotaan mencakup kota-kota dan daerah sekitarnya. Perkotaan ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur yang kompleks (seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih), serta beragam aktivitas ekonomi dan kebudayaan. Perkotaan juga cenderung memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
 - b. Pedesaan (Rural): Pedesaan adalah wilayah di luar kota yang ditandai oleh keberadaan lahan pertanian, kepadatan penduduk yang lebih rendah, dan seringkali memiliki gaya hidup yang lebih tergantung pada pertanian, peternakan, atau kegiatan ekonomi primer lainnya. Infrastruktur di pedesaan biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan perkotaan.

Pemahaman tentang pola pemukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, penting untuk perencanaan perkotaan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi layanan publik. Studi tentang pemukiman juga melibatkan analisis tentang dampak pemukiman manusia terhadap lingkungan alam sekitar, termasuk isu-isu seperti urbanisasi yang berlebihan, keberlanjutan lingkungan, dan manajemen bencana.

Kesenjangan Sosial: Disparitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kesenjangan sosial merujuk pada perbedaan signifikan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Studi tentang kesenjangan sosial melibatkan pemahaman mendalam tentang ketidaksetaraan yang ada dalam distribusi kekayaan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan di antara individu dan kelompok-kelompok dalam suatu populasi.

Mari jelaskan lebih lanjut mengenai ketiga aspek kesenjangan sosial ini: (Nawawi, 2021); (Amane, Razak, *et al.*, 2023)

1. Disparitas Ekonomi: Disparitas ekonomi merujuk pada perbedaan dalam tingkat pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini bisa terjadi dalam konteks lokal, nasional, atau global. Faktor-faktor seperti pekerjaan, pendapatan, kelas sosial, dan mobilitas ekonomi berkontribusi terhadap disparitas ekonomi. Studi tentang disparitas ekonomi membantu dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi.
2. Disparitas Pendidikan: Disparitas pendidikan mengacu pada perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tertentu mungkin menghadapi hambatan akses ke pendidikan yang berkualitas, seperti anak-anak dari keluarga miskin atau minoritas etnis. Disparitas pendidikan juga bisa berkaitan dengan tingkat kelulusan, literasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Disparitas Kesehatan: Disparitas kesehatan mencakup perbedaan dalam status kesehatan, akses ke layanan kesehatan, dan hasil kesehatan antara berbagai kelompok sosial. Kelompok-kelompok dengan status sosial-ekonomi yang rendah atau minoritas etnis seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses perawatan kesehatan yang berkualitas. Disparitas kesehatan juga bisa mencakup perbedaan dalam angka harapan hidup, tingkat penyakit, dan aksesibilitas obat-obatan dan perawatan medis.

Pemahaman yang mendalam tentang kesenjangan sosial penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial, mengembangkan kebijakan yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa semua individu dalam masyarakat memiliki akses yang sama ke peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pengurangan

kesenjangan sosial adalah tujuan penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Geopolitik:

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara geografi, kebijakan luar negeri, kekuatan politik, dan dinamika sosial dalam konteks global. Bidang ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis, seperti lokasi, sumber daya alam, dan topografi, mempengaruhi kebijakan dan hubungan antara negara-negara di dunia. Geopolitik juga melibatkan analisis tentang pengaruh kebijakan ekonomi, militer, budaya, dan ideologi terhadap politik internasional.

Beberapa konsep penting dalam geopolitik meliputi: (Hidayat, 2016); (Setiawan and Sulastri, 2017); (Mustanir, Ibrahim, *et al.*, 2023)

1. **Lokasi dan Akses Geografis:** Lokasi suatu negara, terutama dalam hal hubungan dengan negara-negara tetangga dan jalur perdagangan, memainkan peran penting dalam geopolitik. Negara-negara yang berada di persimpangan jalur perdagangan atau memiliki akses ke sumber daya alam yang berharga seringkali memiliki pengaruh geopolitik yang besar.
2. **Kekuatan Militer:** Kekuatan militer suatu negara mempengaruhi posisi dan pengaruhnya dalam politik global. Negara-negara dengan kekuatan militer yang kuat cenderung memiliki pengaruh politik yang besar dan seringkali berperan dalam kebijakan luar negeri global.
3. **Sumber Daya Alam:** Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, logam, dan air bersih, memiliki posisi tawar dalam hubungan internasional. Kontrol atas sumber daya ini bisa menjadi sumber konflik atau kerjasama antar negara.
4. **Pengaruh Ekonomi:** Kekuatan ekonomi, termasuk kebijakan perdagangan, investasi asing, dan keberhasilan industri, juga merupakan faktor penting dalam geopolitik. Negara-negara

dengan ekonomi yang kuat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan hubungan ekonomi internasional.

5. Ideologi dan Budaya: Ideologi politik dan budaya juga memainkan peran dalam geopolitik. Perbedaan ideologi dan nilai-nilai budaya seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan antar negara.

Geopolitik memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, menentukan aliansi dan mitra dagang, serta memahami dinamika konflik dan kerjasama global. Studi tentang geopolitik membantu pemimpin politik dan ahli strategi untuk memahami kompleksitas hubungan internasional dan membuat keputusan yang cerdas dalam konteks global.

Perbatasan: Batas-batas negara dan wilayah administratif.

Perbatasan merujuk pada garis atau batas yang memisahkan wilayah satu negara dari wilayah negara lain atau memisahkan wilayah administratif di dalam suatu negara. Batas-batas ini menentukan ruang lingkup kekuasaan suatu negara atau pemerintah daerah. Perbatasan dapat bersifat geografis, politis, ekonomis, atau budaya, dan memainkan peran penting dalam hubungan antarnegara, perdagangan internasional, serta administrasi dan pemerintahan dalam suatu negara.

Ada dua jenis perbatasan utama: (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023); (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Zahari *et al.*, 2023); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023)

1. Perbatasan Antar-Negara: Perbatasan antar-negara adalah batas yang memisahkan satu negara dari negara lainnya. Perbatasan ini bisa berupa garis geografis, seperti sungai, pegunungan, atau garis lintang dan bujur tertentu. Perbatasan juga bisa merupakan hasil dari perjanjian diplomatik antara dua negara. Perbatasan antar-negara menentukan wilayah hukum, administratif, dan politik suatu negara.

2. Perbatasan Administratif Dalam Negara: Perbatasan administratif dalam negara memisahkan berbagai wilayah atau provinsi di dalam suatu negara. Perbatasan ini mungkin dibentuk oleh faktor-faktor geografis, etnis, budaya, atau kebijakan pemerintah. Perbatasan administratif menentukan pembagian administratif suatu negara menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti negara bagian, provinsi, kabupaten, atau kota.

Perbatasan memiliki beberapa fungsi penting: (Mustanir, Sagena, *et al.*, 2023); (Hendrayady *et al.*, 2023)

1. Pemisahan Kekuasaan: Perbatasan menentukan wilayah di mana pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat undang-undang, mengenakan pajak, dan menjalankan kebijakan publik.
2. Kontrol dan Keamanan: Perbatasan memungkinkan negara-negara untuk mengontrol masuk dan keluar orang, barang, dan jasa. Perbatasan juga merupakan bagian penting dalam strategi keamanan suatu negara.
3. Penentu Identitas: Perbatasan dapat mencerminkan perbedaan etnis, budaya, dan bahasa di antara kelompok-kelompok manusia. Perbatasan seringkali menjadi penentu identitas nasional dan regional.
4. Regulasi Perdagangan dan Ekonomi: Perbatasan menentukan perdagangan antar-negara dan memungkinkan negara-negara untuk mengenakan tarif, memperluas pasar, dan mengatur perdagangan internasional.

Studi tentang perbatasan melibatkan analisis tentang sejarah pembentukan perbatasan, konflik perbatasan, serta implikasi politik, ekonomi, dan sosial dari perubahan perbatasan. Perbatasan merupakan elemen kunci dalam geopolitik dan hubungan internasional.

Hubungan Internasional: Diplomasi, perdagangan, dan kerjasama antarnegara.

Hubungan internasional merujuk pada interaksi dan koneksi antara negara-negara di dunia. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk diplomasi, perdagangan, kerjasama ekonomi, kebijakan luar negeri, serta konflik dan perdamaian internasional. Mari jelaskan lebih lanjut tentang tiga aspek penting dari hubungan internasional ini:

1. **Diplomasi:** Diplomasi adalah seni dan praktik negara-negara dalam menjalin hubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Diplomasi melibatkan negosiasi, dialog, dan perjanjian untuk mencapai tujuan bersama atau mengatasi perbedaan. Diplomasi dapat terjadi melalui pertemuan resmi antara pejabat pemerintah, konferensi internasional, serta melalui penggunaan duta besar dan perwakilan diplomatik di luar negeri. Diplomasi sering kali berperan penting dalam mencegah konflik berskala besar dan mempromosikan kerjasama internasional.
2. **Perdagangan Internasional:** Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang, jasa, dan kapital antara negara-negara. Hal ini mencakup ekspor dan impor barang, investasi lintas batas, serta kolaborasi ekonomi di tingkat global. Perdagangan internasional membantu negara-negara memperoleh sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri, memperluas pasar untuk produk dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Organisasi perdagangan global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memainkan peran penting dalam mengatur aturan perdagangan internasional dan memfasilitasi pertukaran ekonomi antar negara.
3. **Kerjasama Antar-Negara:** Kerjasama antarnegara melibatkan berbagai bentuk kolaborasi antara negara-negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Negara-negara sering bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pengentasan

kemiskinan, penyebaran penyakit menular, dan terorisme. Organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memfasilitasi kerjasama multilateral di antara negara-negara anggota dengan tujuan mencapai perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Kerjasama internasional dan diplomasi yang efektif, bersama dengan perdagangan yang adil dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan perdamaian global. Hubungan internasional adalah bagian integral dari dinamika dunia modern yang memungkinkan negara-negara untuk saling memahami, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh umat manusia.

Keamanan: Keamanan nasional, konflik, dan upaya perdamaian.

Keamanan adalah kondisi di mana suatu negara atau masyarakat merasa aman dari ancaman atau gangguan terhadap integritas, kedaulatan, kestabilan politik, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Studi tentang keamanan melibatkan pemahaman tentang beberapa aspek, termasuk keamanan nasional, konflik, dan upaya perdamaian. Mari jelaskan lebih lanjut tentang ketiga aspek ini:

1. **Keamanan Nasional:** Keamanan nasional adalah upaya suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatannya dari ancaman luar dan dalam. Ini mencakup perlindungan terhadap wilayah, sumber daya, infrastruktur kritis, serta perlindungan terhadap warga negara dan kepentingan negara. Strategi keamanan nasional melibatkan kebijakan pertahanan, intelijen, dan kerjasama militer, serta manajemen krisis dan mitigasi ancaman seperti terorisme, konflik bersenjata, atau ancaman siber.
2. **Konflik:** Konflik adalah ketidaksepakatan atau benturan antara dua atau lebih pihak yang melibatkan perbedaan-perbedaan dalam pandangan, kepentingan, atau nilai-nilai. Konflik

bersenjata adalah bentuk paling ekstrem dari konflik dan melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi. Konflik bersenjata dapat muncul di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional. Studi tentang konflik melibatkan analisis tentang penyebab, dinamika, dan resolusi konflik serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara-negara yang terlibat.

3. Upaya Perdamaian: Upaya perdamaian melibatkan strategi dan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan konflik bersenjata dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ini mencakup diplomasi, mediasi, negosiasi, serta upaya-upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca-konflik. Organisasi internasional dan perjanjian multilateral sering terlibat dalam upaya perdamaian, berusaha mengatasi konflik dan memfasilitasi proses rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman yang mendalam tentang keamanan, konflik, dan upaya perdamaian penting untuk merencanakan kebijakan keamanan nasional, mengidentifikasi solusi untuk konflik bersenjata, serta membangun perdamaian dan stabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Upaya kolaboratif, dialog terbuka, dan resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan adalah kunci dalam membangun dunia yang aman dan stabil.

EKONOMI

Topik Utama ekonomi (Boswir *et al.*, 2003); (Sinaga and Adi, 2020) adalah

1. Sumber Daya Alam: Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, hutan, mineral, dan energi.
2. Perekonomian: Struktur ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi.
3. Kemiskinan dan Pengangguran: Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan upaya mengatasi masalah ini .

SOSIAL DAN BUDAYA

Budaya dan Identitas: Warisan budaya, bahasa, agama, dan tradisi lokal.

Budaya dan identitas mencakup warisan budaya, bahasa, agama, dan tradisi lokal yang membentuk identitas masyarakat dan kelompok manusia. Ini adalah aspek-aspek penting dari kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik-praktik yang dianut oleh suatu komunitas. Mari jelaskan lebih lanjut tentang masing-masing elemen ini: (I.B. Wirawan, 2012); (Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf; Saragih, Annisa, Ilmi, Wisnujati; Amruddin, Hisarma Nugrahini and Hasnidar, Daud, 2021); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023)

1. **Warisan Budaya:** Warisan budaya mencakup seni, arsitektur, musik, tarian, cerita rakyat, dan lain-lain yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup segala hal yang mencerminkan pencapaian dan identitas kreatif dari suatu masyarakat. Warisan budaya tidak hanya menunjukkan keindahan estetika, tetapi juga menceritakan sejarah dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok manusia.
2. **Bahasa:** Bahasa adalah cara komunikasi utama dalam suatu budaya. Ini tidak hanya memungkinkan orang untuk berbicara satu sama lain, tetapi juga menyediakan wadah untuk menyampaikan nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa adalah salah satu pilar utama dalam mempertahankan dan merawat identitas budaya.
3. **Agama:** Agama mencakup sistem kepercayaan, ritual, dan nilai-nilai spiritual yang diikuti oleh suatu kelompok manusia. Agama memainkan peran penting dalam membimbing perilaku, norma sosial, dan interaksi manusia dengan alam semesta. Agama juga memperkuat identitas kelompok dan menciptakan ikatan sosial yang kuat.
4. **Tradisi Lokal:** Tradisi lokal melibatkan praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas.

Ini bisa mencakup acara-acara adat, festival, ritual, perayaan, serta kebiasaan sehari-hari yang membentuk pola hidup dan identitas lokal. Tradisi lokal memberikan warna dan keunikan pada suatu masyarakat.

Studi tentang budaya dan identitas mencakup pemahaman tentang sejarah budaya, perkembangan bahasa, peran agama dalam masyarakat, serta evolusi dan keberlanjutan tradisi lokal. Ini membantu dalam menghormati keberagaman budaya, mendorong toleransi antar kelompok budaya, dan memahami kompleksitas masyarakat manusia. Menghargai dan merawat budaya dan identitas adalah langkah penting menuju perdamaian dan penghargaan terhadap kekayaan keberagaman manusia di seluruh dunia.

Pendidikan dan Kesehatan: Akses pendidikan dan sistem kesehatan.

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor kunci yang memberikan landasan untuk pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Mari bahas lebih lanjut tentang masing-masing elemen ini:

Pendidikan: (Asdil Aida Nasution and Khairat Manurung, 2019); (Amane, Bagenda, *et al.*, 2023)

1. Akses Pendidikan: Akses pendidikan mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Ini mencakup akses terhadap sekolah, guru berkualitas, buku teks, dan fasilitas pendidikan. Akses pendidikan juga mencakup kesetaraan peluang pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin, etnisitas, agama, atau status sosial ekonomi.
2. Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan melibatkan pembelajaran efektif yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada siswa. Ini melibatkan metode pengajaran yang efisien, kurikulum yang relevan

dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi, serta penilaian yang akurat terhadap kemajuan siswa.

3. Pendidikan Inklusif: Pendidikan inklusif melibatkan pendekatan yang memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan latar belakang etnis atau bahasa yang berbeda, serta anak-anak dari kelompok minoritas agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam sistem pendidikan tanpa diskriminasi.

Kesehatan: (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sagena, *et al.*, 2023)

1. Akses Layanan Kesehatan: Akses layanan kesehatan mencakup kemampuan setiap individu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit. Akses ini juga mencakup akses terhadap obat-obatan yang diperlukan dan informasi kesehatan yang akurat.
2. Kualitas Layanan Kesehatan: Kualitas layanan kesehatan mencakup standar perawatan medis yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini mencakup keberlanjutan pengobatan, penggunaan teknologi medis terkini, dan perawatan yang berbasis bukti ilmiah.
3. Kesehatan Masyarakat: Kesehatan masyarakat melibatkan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat populasi. Ini melibatkan edukasi kesehatan, program vaksinasi, kebijakan anti-merokok, dan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Studi tentang pendidikan dan kesehatan mencakup analisis tentang aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan di dua sektor ini. Upaya-upaya dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat melibatkan kebijakan pendidikan yang inklusif, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta pembangunan sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau.

Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan produktif.

Agama dan Nilai-Nilai: Peran agama dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Agama dan nilai-nilai memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan moral dalam masyarakat. Mari bahas lebih lanjut tentang peran agama dan nilai-nilai dalam membentuk budaya dan norma masyarakat:

1. Peran Agama: (Sindung Haryanto, 2015); (Lubis, 2017); (Muslimin, Sumarna and Abd.Rozak, 2022)
 - a. Moral dan Etika: Agama menyediakan kerangka kerja moral dan etika yang membimbing perilaku manusia. Nilai-nilai agama membimbing individu dalam membuat keputusan moral dan mengajarkan etika yang baik.
 - b. Identitas dan Solidaritas: Agama sering kali membentuk identitas kelompok manusia. Mereka memberikan orang rasa identitas dan kebersamaan dengan komunitas mereka melalui ritual, keyakinan, dan tradisi keagamaan.
 - c. Harapan dan Ketenangan: Agama memberikan harapan dan ketenangan kepada orang dalam menghadapi tantangan hidup. Kepercayaan pada keberadaan kekuatan rohaniyah dan kehidupan setelah kematian bisa memberikan penghiburan dan ketenangan dalam menghadapi penderitaan dan kehilangan.
2. Peran Nilai-Nilai: (Sztömpka, 2017); (Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf ; Saragih, Annisa, Ilmi, Wisnujati; Amruddin, Hisarma Nugrahini and Hasnidar, Daud, 2021)
 - a. Norma dan Aturan Sosial: Nilai-nilai membentuk norma dan aturan sosial yang mengatur interaksi manusia. Mereka menciptakan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat.
 - b. Pendidikan dan Sosialisasi: Nilai-nilai diajarkan kepada generasi muda melalui pendidikan dan sosialisasi.

Mereka membentuk dasar moral dan etika individu seiring dengan tumbuhnya manusia.

- c. Kerjasama dan Keharmonisan: Nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan keadilan mendorong kerjasama dan keharmonisan dalam masyarakat. Mereka menciptakan dasar bagi interaksi yang saling menghormati dan mendukung.

Namun, penting untuk diingat bahwa peran agama dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat bervariasi secara signifikan antara budaya dan kelompok sosial. Beberapa masyarakat mungkin lebih tradisional dan konservatif dalam interpretasi agama dan nilai-nilai, sementara yang lain mungkin mengadopsi interpretasi yang lebih liberal.

Pentingnya peran agama dan nilai-nilai dalam masyarakat menunjukkan kompleksitas hubungan antara kepercayaan, budaya, dan perilaku manusia. Ini juga menyoroti pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya yang saling menghormati dan memahami dalam mempromosikan toleransi, keberagaman, dan perdamaian dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global.

LINGKUNGAN

Topik Utama Lingkungan (Komarudin, 1999); (Nurba *et al.*, 2018) adalah :

1. Konservasi Alam: Perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
2. Pencemaran Lingkungan: Polusi udara, air, tanah, dan upaya mitigasi.
3. Perubahan Iklim: Dampak dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

Keberlanjutan Lingkungan: (Haq, 2020)

1. Dampak Manusia terhadap Lingkungan: Studi tentang cara manusia mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam.
2. Pembangunan Berkelanjutan: Penelitian tentang upaya-upaya untuk mengembangkan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Geografi Manusia penting karena memberikan wawasan tentang dinamika manusia di berbagai bagian dunia dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk merencanakan pembangunan dan mengatasi tantangan sosial ekonomi dengan cara yang berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, R. T. F. A. *et al.* (2023) *Manajemen Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., *et al.* (2023) *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Mutolib, A., *et al.* (2023) *DEMOGRAFI*. Pertama. Edited by Aas Masruroh. Bandung: Widina Media Utama.
- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* (2023) *ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Febriana, R. W., *et al.* (2023) *PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implementasi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang)*. Pertama. Edited by Sepriano and A. Juansa. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., *et al.* (2023) *Pembangunan Desa*. Pertama. Edited by S. Fatimah. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* (2023) *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Anggara, S. (2012) *Perbandingan Administrasi Negara*. Pertama. Edited by B. A. Saebani. Bandung: Pustaka Setia.
- Asdil Aida Nasution and Khairat Manurung (2019) *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*. Pertama. Edited by Nur Azizah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Bormasa, M. F. *et al.* (2023) *Birokrasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Boswir, R. *et al.* (2003) *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*.

- Dr. Sindung Haryanto, M. S. (2015) *SOSIOLOGI AGAMA Dari Klasik Hingga Postmodern*. 1st edn. Edited by Andien. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Gai, A. M., Witjaksono, A. and Maulida, R. R. (2020) *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Pertama. Karangploso (Malang): CV.Dream Litera Buana.
- Guampe, F. A. *et al.* (2022) *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Haq, T. anugrah (2020) *Materi pokok bidang studi demografi*. Pertama. Edited by D. M. dan P. P. P. D. B. P. P. T. Nasional. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hendrayady, A. *et al.* (2023) *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hidayat, F. (2016) *Pengantar Teori-Teori Filsafat*.
- Komarudin (1999) *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Edited by W. Alfisa and E. Setyaningrum. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Bekerjasama dengan DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN TEKNOLOGI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
- Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf; Saragih, Annisa, Ilmi, F., Wisnujati; Amruddin, Hisarma Nugrahini, S. S. I. M. M. Y. and Hasnidar, Daud, J. H. P. (2021) *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Lubis, R. (2017) *SOSIOLOGI AGAMA: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. 2nd edn. Edited by I. Syaukani. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Mansyur, A. I. *et al.* (2023) *SOSIOLOGI PERKOTAAN*. Pertama. Edited by E. Damayant. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Muslimin, Sumarna, C. and Abd.Rozak (2022) 'Patologi Sosial dan Kesehatan Mental; Orientasi Problematika dan Solusi (dalam Kajian Pendidikan Agama Islam)', *Pendidikan dan Konseling*, 4(6), pp. 9820–9826. doi: 10.31004/jpdk.v4i6.9943.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasius Tobondo, *et al.* (2023) *BIROKRASI INDONESIA*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mustanir, A., Ibrahim, M. M., *et al.* (2023) *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Sagena, U., *et al.* (2023) *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. Pertama, *Mafy Media Literasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Asari. Solok.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., *et al.* (2023) *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nawawi, A. (2021) 'Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), pp. 105–112.
- Nurba, D. *et al.* (2018) *PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)*. 1st edn. Edited by D. Nurba *et al.* Banda Aceh: Lembaga Kajian Pembangunan, Pertanian dan Lingkungan.
- Prof. Dr. I.B. Wirawan (2012) *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. 4th edn. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Rudito, B. *et al.* (2016) *Aparatur Sipil Negara*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Salampessy, M. *et al.* (2023) *KEBIJAKAN PUBLIK*. Pertama, *CV. Gita Lentera*. Pertama. Edited by Ukas. Padang.
- Setiawan, A. and Sulastri, E. (2017) *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ PRESS.

- Sinaga, R. P. K. and Adi, I. R. (2020) 'Kondisi Ekonomi Petani Dalam Konflik Agraria (Studi Pada Anggota Serikat Petani Indonesia)', *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), pp. 151–165. doi: 10.7454/jpm.v1i2.1009.
- Sztömpka, P. (2017) *Sosiologi Perubahan Sosial*. 8th edn. Rawamangun: Kencana.
- Tjondronegoro Soediono M.P (2008) *Negara Agraris Ingkari Agraria Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia, Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*.
- Wahyudi, B. (2018) *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*. 1st edn. Edited by M. M. Maysarah. Yogyakarta: PUSTAKA SENJA.
- Zahari, A. F. M. *et al.* (2023) *Reformasi Administrasi Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui:

email:putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301



BAB II

PERTUMBUHAN WILAYAH

OLEH ISA AYU FATIMAH

DEFINISI PERTUMBUHAN WILAYAH

Pertumbuhan wilayah merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai aspek dan faktor yang saling terkait. Definisi pertumbuhan wilayah dapat dipahami melalui beberapa dimensi, seperti pertumbuhan ekonomi, demografi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan.

Pertumbuhan wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan ekonomi yang signifikan di suatu wilayah. Hal ini mencakup peningkatan produksi, pendapatan per kapita, dan investasi yang

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat (Mufarrikhah, Yuniardi and Syakarofath, 2020). Aspek demografi menjadi penting dalam konteks pertumbuhan wilayah. Peningkatan jumlah penduduk, migrasi, dan struktur demografi yang seimbang dapat menjadi indikator pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Pertumbuhan wilayah juga mencakup perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang produktif dan berdaya saing. Infrastruktur merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Pembangunan transportasi, komunikasi, dan energi yang efisien dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah tersebut (Jegiftha, Gosal and Sambiran, 2018).

Aspek lingkungan perlu diperhatikan dalam konteks pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga perlu diterapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta penelitian dan pengembangan dapat menjadi pendorong utama perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat adalah faktor krusial dalam mencapai pertumbuhan wilayah yang inklusif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akseptabilitas dan dampak positif dari pembangunan wilayah (Susila Wibawa, 2019).

Secara keseluruhan definisi pertumbuhan wilayah melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari ekonomi, demografi, sosial, infrastruktur, lingkungan, inovasi, hingga partisipasi masyarakat. Pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan

perencanaan yang holistik untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan inklusif.

TEORI KUTUB PERTUMBUHAN

Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Concept*) dikemukakan oleh ahli ekonomi Prancis, François Perroux, pada tahun 1950. Konsep ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi merata di seluruh wilayah, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai "kutub pertumbuhan." Kutub pertumbuhan bukan hanya kota atau wilayah, tetapi suatu kegiatan ekonomi yang dinamis.

1. Kutub pertumbuhan

Kutub pertumbuhan merupakan pusat-pusat ekonomi yang dinamis dan memiliki daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan di sekitarnya. Pusat ini bisa berupa sektor industri tertentu, pusat penelitian, atau bahkan kawasan yang berkembang pesat.

2. Sentripetal dan Sentrifugal

Konsep ini melibatkan dua kekuatan utama. Sentripetal adalah kekuatan yang menarik kegiatan ekonomi terkait dan mendukung pertumbuhan di pusat tersebut. Sebagai contoh, pusat industri dapat menarik aktivitas penelitian dan pasokan bahan baku. Sentrifugal adalah kekuatan yang menyebabkan aktivitas ekonomi baru berkembang di sekitar pusat, tetapi tidak secara langsung terkait. Misalnya, pertumbuhan industri baja dapat menciptakan usaha kecil yang menyediakan layanan pendukung, seperti jasa transportasi atau penyediaan makanan bagi pekerja industri.

Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan terjadi secara bertahap. Beberapa pusat pertumbuhan dapat tumbuh lebih cepat daripada wilayah lainnya, dan hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi pertumbuhan ekonomi (Parr, 1999). Kutub pertumbuhan bukanlah entitas statis; mereka dinamis dan dapat berubah seiring waktu.

Interaksi antara sektor-sektor ekonomi di dalam pusat pertumbuhan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, investasi, dan pertumbuhan lebih lanjut. Konsep ini mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipacu oleh kegiatan-kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan regional dapat difokuskan pada pengembangan kutub pertumbuhan untuk menciptakan efek domino dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Penerapan teori kutub pertumbuhan dapat membantu perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan memahami bagaimana kegiatan ekonomi tertentu dapat menjadi katalisator pertumbuhan dalam suatu wilayah.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN WILAYAH

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah bersifat kompleks dan melibatkan sejumlah variabel ekonomi, sosial, demografis, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat memengaruhi pertumbuhan wilayah:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam

Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti pertanian yang subur, hutan, atau tambang mineral, cenderung memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Eksploitasi dan pengelolaan sumber daya ini dengan bijak dapat menjadi dorongan signifikan untuk pertumbuhan wilayah.

2. Infrastruktur

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, sangat mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Infrastruktur yang baik memudahkan pergerakan barang dan orang, meningkatkan konektivitas, dan mendorong investasi.

3. Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan wilayah. Wilayah dengan

tenaga kerja yang terampil dan terdidik cenderung lebih inovatif, produktif, dan mampu menanggapi perubahan ekonomi global.

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi, perpajakan, dan regulasi, dapat signifikan mempengaruhi iklim bisnis dan investasi di suatu wilayah. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi biasanya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan wilayah (Kornberger *et al.*, 2017).

5. Teknologi dan Inovasi

Wilayah yang mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru cenderung lebih kompetitif. Inovasi teknologi dapat membuka peluang baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan efisiensi proses produksi.

6. Stabilitas Politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan sangat penting untuk pertumbuhan wilayah. Wilayah yang stabil politiknya cenderung menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

7. Globalisasi

Keterlibatan dalam ekonomi global dapat mempercepat pertumbuhan wilayah. Akses ke pasar internasional dan partisipasi dalam rantai pasok global dapat membuka peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi (Ristanti and Handoyo, 2017).

8. Kondisi Demografis

Struktur dan dinamika demografis, seperti pertumbuhan penduduk, distribusi usia, dan migrasi, dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan distribusi usia yang seimbang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Trend Global dan Regional: Menganalisis Tren yang Mempengaruhi Pertumbuhan Wilayah

1. Teknologi dan Inovasi

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, internet of things (IoT), dan teknologi hijau menjadi penggerak utama pertumbuhan di berbagai wilayah. Wilayah yang berhasil mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ini dalam infrastruktur dan industri mereka akan memiliki keunggulan kompetitif (Fitri Anggreani, 2021).

2. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Tren global menuju keberlanjutan memengaruhi kebijakan dan praktik bisnis di seluruh dunia. Wilayah yang berinvestasi dalam energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan praktik berkelanjutan lainnya dapat menarik investasi dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Globalisasi dan Perdagangan

Meskipun ada tantangan dalam perdagangan global, terdapat peluang bagi wilayah-wilayah yang dapat mengelola rantai pasokan dengan efisien dan memanfaatkan hubungan perdagangan internasional untuk memperluas pasar mereka.

4. Tren Regional

Urbanisasi: Banyak wilayah mengalami pertumbuhan populasi perkotaan yang signifikan. Pengelolaan pertumbuhan perkotaan dengan efektif dan penyediaan infrastruktur yang memadai akan memainkan peran penting dalam pembentukan ekonomi regional.

5. Demografi

Perubahan dalam struktur demografis, seperti penuaan populasi atau peningkatan angkatan kerja muda, dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Wilayah yang dapat menyesuaikan kebijakan mereka dengan perubahan demografis akan lebih dapat berkembang.

6. Ketergantungan pada Sektor Tertentu
Beberapa wilayah mungkin sangat tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, pariwisata, atau manufaktur. Perubahan dalam sektor ini, baik dari sisi teknologi atau kebijakan, dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah secara signifikan.

Agenda Pengembangan Wilayah: Mencapai Pertumbuhan yang Berkelanjutan

1. Diversifikasi Ekonomi
Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah terhadap perubahan pasar global (Constantino, 2018).
2. Pendidikan dan Keterampilan
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan angkatan kerja lokal menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah, terutama dalam sektor-sektor inovatif.
3. Infrastruktur yang Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan modern menjadi kunci untuk menarik investasi, meningkatkan mobilitas, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijakan Keberlanjutan
Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk sumber daya energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik bisnis berkelanjutan (Ehrlich and Ehrlich, 2016).
5. Kolaborasi Regional
Mendorong kerja sama antarwilayah untuk membangun sinergi, membagi sumber daya, dan menciptakan peluang kolaboratif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama.

6. Inovasi dan Riset

Mendukung inovasi dan riset untuk memajukan sektor-sektor kunci dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Constantino, R. (2018) 'Towards a Theory of Planned Economy', *Towards a Theory of Planned Economy*. doi: 10.4324/9781138019270.
- Ehrlich, P. R. and Ehrlich, A. H. (2016) 'Population, Resources, and the Faith-Based Economy: the Situation in 2016', *BioPhysical Economics and Resource Quality 2016 1:1*, 1(1), pp. 1–9. doi: 10.1007/S41247-016-0003-Y.
- Fitri Anggreani, T. (2021) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Swot: Strategi Pengembangan Sdm, Strategi Bisnis, Dan Strategi Msdm (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(5), pp. 619–629. doi: 10.31933/jemsi.v2i5.588.
- Jegiftha, L., Gosal, R. and Sambiran, S. (2018) 'Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud', *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), pp. 1–11.
- Kornberger, M. *et al.* (2017) 'When Bureaucracy Meets the Crowd: Studying "Open Government" in the Vienna City Administration', <http://dx.doi.org/10.1177/0170840616655496>, 38(2), pp. 179–200. doi: 10.1177/0170840616655496.
- Mufarrikah, J. L., Yuniardi, M. S. and Syakarofath, N. A. (2020) 'Peran Perceived Organizational Support terhadap Work Engagement Karyawan', *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 6(2), pp. 151–164. doi: 10.22146/gamajop.56396.
- Parr, J. B. (1999) 'Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View', <http://dx.doi.org/10.1080/0042098992971>, 36(8), pp. 1247–1268. doi: 10.1080/0042098992971.

- Ristanti, Y. D. and Handoyo, E. (2017) 'Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah', *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), pp. 115-122.
- Susila Wibawa, K. C. (2019) 'Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan', *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), pp. 79-92. doi: 10.14710/alj.v2i1.79-92.

BIODATA PENULIS



Isa Ayu Fatimah, S.Pd.
Pegiat Komunitas Pengajar
Guru

Penulis lahir di Klaten tanggal 1 Juni 2000. Penulis adalah guru di lembaga belajar non formal di Sukoharjo dan Surakarta. Penulis menekuni bidang Pendidikan, Penelitian, dan Literasi. Penulis aktif sebagai aktivis yang mendukung bidang pendidikan sejak duduk di bangku SMA yaitu tahun 2016 dalam komunitas Sukoharjo Mengajar, hingga tahun 2021 mendirikan komunitas untuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan di dunia pendidikan dan terjun sebagai pengajar yaitu Happy Learning. Penulis memiliki harapan suatu saat gerakan kecil di bidang pendidikan dan literasi akan membantu membuka pintu kemudahan berbagai bidang bagi siapapun.



BAB XV

PERAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

OLEH RUSLINA

PENGERTIAN KEPALA DAERAH

Kepala daerah adalah seorang pejabat atau pemimpin yang memimpin suatu wilayah atau daerah tertentu. Istilah kepala daerah umumnya digunakan dalam konteks pemerintahan lokal atau otonomi daerah di suatu negara. Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya,

serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perkembangan daerah tersebut. Kepala daerah secara umum merujuk pada gubernur, bupati, wali kota.

Kepala daerah biasanya dipilih melalui proses pemilihan umum atau dilantik oleh pemerintah pusat, tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Tugas utama mereka melibatkan pengambilan keputusan terkait pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya dan keuangan di daerahnya.

JENIS-JENIS KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis kepala daerah yang memimpin tingkatan pemerintahan daerah yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis kepala daerah di Indonesia:

Gubernur

Gubernur adalah kepala daerah tingkat provinsi di Indonesia. Posisi ini diisi melalui pemilihan umum di tingkat provinsi, di mana masyarakat memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin provinsi tersebut. Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola urusan pemerintahan provinsi. Tanggung jawabnya mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya di wilayah provinsi.

Selain itu, gubernur juga bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat di tingkat provinsi, sehingga perannya sangat penting dalam menjaga koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Gubernur memainkan peran kunci dalam pengembangan dan kemajuan provinsi, berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

Bupati

Bupati adalah kepala daerah tingkat kabupaten di Indonesia. Proses pemilihan umum di tingkat kabupaten menentukan siapa yang akan mengemban tugas sebagai bupati, di mana masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Bupati memiliki tanggung jawab utama terhadap pemerintahan kabupaten, termasuk dalam hal pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

Selain itu, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat kabupaten, bupati juga bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, peran bupati sangat signifikan dalam mengelola dan menggerakkan pembangunan daerahnya, dengan fokus pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat, sekaligus menjaga kesejajaran dengan arahan kebijakan nasional.

Walikota

Walikota merupakan kepala daerah tingkat kota di Indonesia. Proses pemilihan umum di tingkat kota menentukan siapa yang akan menjabat sebagai walikota, dengan partisipasi langsung dari masyarakat. Walikota memiliki tanggung jawab utama terhadap pemerintahan kota, termasuk dalam hal pengelolaan urusan kota, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sebagai pemimpin di tingkat kota, walikota bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di tingkat kota, menjaga sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, peran walikota sangat penting dalam mengelola perkembangan kota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di tingkat kota.

Wakil Kepala Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, masing-masing membentuk sebuah

tim kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Wakil kepala daerah memiliki peran sebagai mitra yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi utama wakil kepala daerah adalah memberikan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta menjadi perwakilan kepala daerah dalam berbagai kesempatan.

Selain itu, wakil kepala daerah dapat mengambil alih tugas kepala daerah jika diperlukan, misalnya saat kepala daerah sedang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dengan adanya wakil kepala daerah, diharapkan dapat terwujud kerjasama yang efektif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan kepemimpinan yang berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

PERAN KEPALA DAERAH

Peran seorang kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya. Berikut adalah beberapa peran utama kepala daerah dalam pembangunan wilayah :

Pembangunan Infrastruktur: Proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh kepala daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian krusial dari tugas kepala daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Salah satu bentuk proyek infrastruktur yang dikelola oleh kepala daerah adalah pengembangan jaringan transportasi. Gubernur, bupati, atau walikota bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, terminal transportasi, dan transportasi umum lainnya. Pembangunan infrastruktur transportasi yang baik dapat

meningkatkan konektivitas antarwilayah, memudahkan mobilitas masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.

Kepala daerah terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan atau perluasan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta pembangunan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, merupakan prioritas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kepala daerah berperan dalam mengelola anggaran dan merencanakan pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penduduk di wilayahnya.

Proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh kepala daerah juga mencakup sektor perumahan dan permukiman. Pembangunan infrastruktur perumahan, termasuk pembangunan jaringan air bersih, sanitasi, dan drainase, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Bupati atau walikota memiliki peran penting dalam menanggapi kebutuhan perumahan masyarakat dan mengelola proyek-proyek ini secara efektif (Wicaksono and Karniawati, 2023).

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi perhatian kepala daerah modern. Gubernur, bupati, atau walikota yang progresif akan merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur TIK untuk meningkatkan konektivitas digital, mendukung pelayanan publik online, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di wilayahnya (Maulana, 2021). Dengan cara ini, kepala daerah berperan sebagai pengelola pembangunan infrastruktur yang holistik, mencakup berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pelayanan Publik: Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama kepala daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi publik. Gubernur, bupati, atau walikota bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan di sektor-sektor tersebut. Ini mencakup upaya memperbaiki proses administratif, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan.

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Gubernur, bupati, atau walikota yang progresif akan memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Bisri and Asmoro, 2019). Misalnya, penggunaan platform digital untuk administrasi publik, sistem informasi kesehatan elektronik, atau layanan transportasi online dapat membantu mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pelayanan publik merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala daerah diharapkan untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pelayanan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pelayanan publik.

Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan publik merupakan langkah penting dalam

menilai efektivitas dan keberlanjutan perbaikan yang telah dilakukan (Endah and Vestikowati, 2021). Gubernur, bupati, atau walikota harus memastikan bahwa ada mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, termasuk pengumpulan umpan balik dari masyarakat, untuk terus meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang muncul. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat serta perubahan kebutuhan.

Pengembangan Ekonomi: Kebijakan dan program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi merupakan salah satu fokus utama kepala daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kepala daerah memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal. Ini mencakup penyusunan kebijakan investasi, pengembangan infrastruktur ekonomi, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Gubernur, bupati, atau walikota perlu memahami potensi ekonomi daerah dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pengembangan ekonomi daerah juga melibatkan penciptaan program-program inovatif yang mendorong kewirausahaan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Kepala daerah dapat memberikan dukungan melalui insentif, pelatihan, dan fasilitas pendanaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha. Dengan memberdayakan sektor UKM, kepala daerah berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Cemporaningsih, Raharjana and Damanik, 2020).

Kolaborasi dengan sektor swasta dan pihak terkait lainnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan program pengembangan ekonomi. Kepala daerah perlu membangun

kemitraan dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dapat mencakup pengembangan pusat inovasi, pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, dan pemberdayaan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kepala daerah perlu merancang kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan peningkatan efisiensi energi (Marlinah, 2017). Selain itu, program pengembangan ekonomi juga seharusnya menciptakan dampak sosial positif dengan mengurangi disparitas ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memastikan inklusivitas dalam distribusi manfaat ekonomi.

Dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang holistik, kepala daerah dapat memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia: Kebijakan pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah merupakan aspek penting yang menjadi sorotan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing wilayahnya. Kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan SDM. Ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta pembangunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kepala daerah perlu memastikan bahwa setiap warga di wilayahnya memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan.

Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga menjadi bagian integral dari kebijakan kepala daerah dalam memperkuat SDM di daerahnya (Fajriyani *et al.*, 2023). Kepala daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan industri untuk menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dalam era globalisasi.

Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah fokus penting dalam kebijakan pengembangan SDM. Kepala daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh warganya. Program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan, juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktivitas SDM.

Kepala daerah perlu mengedepankan kebijakan inklusif yang mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam pengembangan SDM (Simposium *et al.*, 2022). Hal ini dapat mencakup program-program untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pendidikan dan pekerjaan, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga.

Dengan merancang kebijakan yang holistik dan berkelanjutan di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pemberdayaan gender, kepala daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di wilayahnya. Ini tidak hanya berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kepala daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dan membimbing pembangunan suatu wilayah. Sebagai pemimpin eksekutif, mereka tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan efisien, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kepala daerah berperan sebagai manajer keuangan daerah, mengelola sumber daya finansial untuk mendukung proyek-proyek strategis dan program-program pelayanan publik.

Pada intinya, peran mereka tidak terbatas pada aspek administratif, namun juga melibatkan kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan perannya yang kompleks dan multidimensional, kepala daerah memiliki dampak langsung terhadap perkembangan dan kesejahteraan suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, M. H. and Asmoro, B. T. (2019) 'Etika Pelayanan Publik di Indonesia', *Journal of Governance Innovation*, 1(1), pp. 59–76. doi: 10.36636/jogiv.v1i1.298.
- Cemporaningsih, E., Raharjana, D. T. and Damanik, J. (2020) 'Ekonomi Kreatif sebagai Poros Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), p. 106. doi: 10.22146/jnp.60401.
- Endah, K. and Vestikowati, E. (2021) 'Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), pp. 647–656. Available at: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2491>.
- Fajriyani, D. *et al.* (2023) 'Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), pp. 1004–1013. doi: 10.31933/jemsi.v4i6.1631.
- Marlinah, L. (2017) 'Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif', *Jurnal Cakrawala: ejournal.bsi.ac.id*, 17(2), pp. 258–265. Available at: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>.
- Maulana, M. R. (2021) 'Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1). doi: 10.58258/jisip.v5i1.1646.
- Simposium, P. *et al.* (2022) 'Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Era Digital Melalui Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Di Universitas', 4, pp. 479–486.

Wicaksono, Z. A. and Karniawati, N. (2023) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR RISET DI INDONESIA', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).

BIODATA PENULIS



Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos.,M.A.P

Dosen Hukum Tata Negara

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Penulis lahir di Bogor, 26 Juni 1984. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri.

Penulis menempuh S1 pada Program studi Ilmu Administrasi Negara dan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada prodi Magister Administrasi Publik. Lalu saat buku ini ditulis, penulis sedang menempuh S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.



BAB XVI

PERAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

OLEH BACHTIAR AHMAD FANI RANGKUTI

PENTINGNYA PERAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam konteks konstitusional, berdasarkan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden juga memiliki kewenangan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya, yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, 2004). Hal ini mencakup mengidentifikasi arah yang diinginkan untuk pembangunan nasional dan menetapkan landasan filosofis, ekonomi, sosial, dan politik yang akan membimbing kebijakan dan tindakan pemerintah.

Presiden harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana negara seharusnya berkembang dalam jangka panjang. Menentukan prioritas-prioritas utama untuk mencapai visi tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan sebagainya. Presiden berperan dalam menetapkan kebijakan moneter melalui bank sentral dan kebijakan fiskal melalui anggaran negara. Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan defisit anggaran untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Presiden harus mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan dan memberlakukan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan pengembangan industri.

VISI DAN MISI PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi dan misi Presiden untuk pembangunan nasional merupakan landasan yang penting dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Sebagai contoh, visi pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2020-2024 adalah "Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur".

Visi ini mencerminkan tujuan untuk mencapai kedaulatan, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek

ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Presiden memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan pembangunan di suatu negara. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memainkan peran penting dalam pembangunan industri manufaktur. Selama tujuh tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah mengarahkan pembangunan sektor industri manufaktur dengan visi dan misi yang terkenal dengan Nawacita. Visi ini mencakup penguatan daerah-daerah dan desa, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan produktivitas rakyat, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG DIPERKENALKAN PRESIDEN

Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan berbagai kebijakan pembangunan yang mencakup beberapa aspek penting, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama untuk bersaing dengan negara lain. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai kunci untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah pergerakan barang dan jasa (Reza Hariyadi, 2021). Hal ini membuka peluang investasi baru, mendukung sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dianggap sebagai upaya untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, bukan hanya fokus di pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi berharap dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi umum dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan penduduk.

Beberapa proyek infrastruktur prioritas yang diluncurkan antara lain adalah pembangunan jalan tol, pengembangan pelabuhan, perluasan bandara, dan proyek kereta cepat. Ini mencakup proyek-proyek besar seperti Tol Trans-Jawa, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, dan proyek LRT (Light Rail Transit) di beberapa kota besar. Pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak berganda, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek-aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, meningkatnya konektivitas dapat meningkatkan akses penduduk terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan, sementara pembangunan berkelanjutan mencoba meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Presiden Jokowi juga telah menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Beliau menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi agenda besar kedua setelah pembangunan infrastruktur. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan inovasi serta teknologi.

Presiden Jokowi menyoroti perlunya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru. Peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat melahirkan lulusan yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Pemerintah mengevaluasi sistem pendidikan dengan memperhatikan pengembangan karakter anak didik. Hal ini dilakukan melalui peletakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik.

Selain pendidikan formal, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini

mencakup program-program pelatihan vokasional dan teknis untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Fokusnya adalah pada keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja modern.

Pemerintah berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pihak ketiga lainnya untuk mendukung pembangunan SDM (Silalahi, 2020). Keterlibatan aktif dari pihak swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memberikan peluang pelatihan kerja.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Visi dan misi Presiden Jokowi mencakup pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun dalam upaya menuju negara yang sejahtera dan adil-merata dalam dua dekade berikutnya.

Presiden Jokowi menekankan perlunya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup pemerataan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur agar tidak hanya terfokus di wilayah-wilayah tertentu, terutama di luar pulau Jawa. Dengan demikian, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.

Pemerintahan Jokowi memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang kental dengan identitas Indonesia. Hal ini mencakup dukungan terhadap seni, kearifan lokal, dan kebudayaan yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya bangsa.

Presiden Jokowi menetapkan target pembangunan yang ambisius dengan jangka waktu dua dekade. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa perubahan signifikan memerlukan waktu dan konsistensi

dalam kebijakan pembangunan. Dalam jangka waktu tersebut, diharapkan terjadi perubahan positif yang berkelanjutan dalam kesejahteraan masyarakat.

Visi Presiden Jokowi mencakup cita-cita menuju negara yang sejahtera dan adil-merata. Artinya, tidak hanya mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan keberagaman diakui dan dihormati dalam setiap aspek pembangunan.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meratakan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

PERAN PRESIDEN DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL.

Peran Presiden dalam membangun hubungan internasional yang mendukung pembangunan nasional meliputi beberapa aspek penting:

1. Kerja Sama Pembangunan Internasional

Presiden memiliki peran dalam menjalin kerja sama pembangunan internasional untuk mendukung pembangunan nasional. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur, lingkungan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui kerja sama ini, negara dapat memperoleh dukungan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Presiden Joko Widodo, misalnya, menegaskan keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama multilateral dengan prinsip saling menguntungkan. Selain itu, dalam diplomasi ekonomi, Presiden Jokowi menetapkan lima arah politik luar negeri, termasuk pemantapan peran Indonesia di ASEAN dan menjaga stabilitas

ekonomi nasional, regional, dan internasional. Undang-undang Republik Indonesia juga menegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri berada di tangan Presiden

2. Pengelolaan Hubungan Bilateral

Presiden juga bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara hubungan bilateral dengan negara lain. Melalui diplomasi dan kerja sama bilateral, Presiden dapat memperjuangkan kepentingan nasional serta mendapatkan dukungan dalam pembangunan nasional, termasuk dalam hal investasi, teknologi, dan bantuan pembangunan

3. Pengaruh dalam Organisasi Internasional

Presiden juga memiliki peran dalam memanfaatkan pengaruh Indonesia di organisasi internasional untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui partisipasi aktif dalam forum internasional, Presiden dapat memperjuangkan kepentingan nasional serta memperoleh dukungan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendanaan, teknologi, dan keberlanjutan

Dengan demikian, peran Presiden dalam membangun hubungan internasional yang mendukung pembangunan nasional meliputi kerja sama pembangunan internasional, pengelolaan hubungan bilateral, dan pengaruh dalam organisasi internasional. Melalui upaya ini, Presiden dapat memperjuangkan kepentingan nasional serta memperoleh dukungan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional mencakup beberapa aspek kunci yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi:

1. Ketidaksetaraan Ekonomi

Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi dapat menjadi hambatan besar dalam pembangunan nasional (Larasasati and Desy Natasya, 2017). Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin perlu diambil untuk mencapai pembangunan yang inklusif.

2. Pengangguran: Menangani tingkat pengangguran yang tinggi atau tingkat pekerjaan yang tidak layak dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci.

3. Korupsi

Korupsi dapat menghambat pembangunan dengan mengurangi efisiensi, menghambat investasi, dan merugikan distribusi yang adil. Upaya untuk memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan sangat penting.

4. Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses penting untuk pembangunan manusia. Tantangan termasuk akses yang tidak merata ke layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat miskin.

5. Konflik dan Ketidakstabilan Politik

Konflik dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pembangunan nasional. Penyelesaian konflik, pembangunan institusi politik yang stabil, dan perlindungan hak asasi manusia adalah faktor penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Larasasati, C. and Desy Natasya, E. (2017) 'Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, (2), pp. 147–160. Available at: www.presidentri.
- Reza Hariyadi, A. (2021) 'Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia', *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), pp. 259–276. doi: 10.30656/jdkp.v2i2.3887.
- Silalahi, A. D. (2020) 'Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 7(2), p. 185. doi: 10.24252/jurisprudentie.v7i2.17227.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 (2004) 'Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional', *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1(3), pp. 1–32. Available at: [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf).

BIODATA PENULIS



Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, M.Si.

Dosen Ekonomi Pembangunan
STAIS Ishlahiyah, Binjai, Sumatera Utara

Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, pria kelahiran Kota Medan pada 20 Oktober 1993. Memiliki Istri yang bernama Nurzilah Laila, S.Pd., dan seorang anak gadis kelahiran Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang bernama Kaifiya Nuha Mecca Rangkuti. Pria lulusan Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan ini merupakan anak pertama dari empat bersaudara serta dibesarkan oleh kedua orang tua yang memiliki jarak secara fisik menjadikannya sangat giat dalam mengejar pendidikan melalui jalur beasiswa, hal ini dapat terlihat dari latar belakang pendidikan Sekolah dasar Negeri 060866 (2005), Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jihad (2008), Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN Sumatera Utara (2012), beasiswa pendidikan, Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Islamic Centre (2012), beasiswa PDAM , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Program Studi Manajemen Dakwah (2016), beasiswa BIDIKMISI dan Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatera Utara (2020), beasiswa KEMENPORA.

Perjalanannya dalam mengejar pendidikan ditengah segala keterbatasan menempahnya untuk turut aktif dalam dunia pendidikan, hal ini terlihat dari usahanya dalam mendirikan sebuah Pondok Tahfidz yang dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Disamping itu dilihat dari pengabdianya pada Pondok Pesantren sabagai pengajar dibidang Tahfidz, dan menjadi dosen pada STAIS Ishlahiyah Binjai dan UIN Sumatera Utara Medan.



BAB XVII

KOTA-KOTA BARU

OLEH NURMIAH

Kota – Kota yang telah berkembang di negara – negara industri dapat memilih sasaran yang diinginkan, baik secara keseluruhan maupun hanya Sebagian, dari karakter umum yang muncul dari adanya pengalaman adanya kota – kota baru untuk dicapai secara bertahap, sejalan dengan meningkatnya berbagai peluang selama bertahun – tahun. (Branch C Meville, 1995)

Kota – kota yang ada pada saat ini adalah suatu bentuk perkembangan baru, dapat di artikan bahwa semua kota yang ada

pada saat ini pada awalnya adalah kota – kota baru. Ketika dirunut dari Sejarah yang Panjang tentang evolusi manusia yang terjadi regenerasi dalam jutaan tahun lamanya, perkembangan manusia jaman purba yang di mulai dari nomaden berpindah sehingga membentuk suatu perkembangan hunian yang menetap kita bisa sebut permanen. Bangunan permanen yang tertua yang berhasil ditemukan pada saat ini hanya berusia 8000 tahun. Banyak diantara kota – kota tua tersebut runtuh dan sekarang hanya di jumpai berbentuk situs ataupun kota tidak berpenghuni. Hal ini menunjukkan relasi secara kuantitas perkembangan manusia dan kota membentuk jumlah, ukuran dan keragaman kota menjadi sebuah fenomena baru.

Muncul dan terbentuknya sebuah hunian memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. sebuah gambaran pertimbangan yang dapat kita lihat tumbuhnya daerah hunian pertama kali menandai masa peralihan dari nomaden (berpindah – pindah) ke tahap menetap, sehingga membentuk sistem organisasi, produksi dan kebudayaan yang berbeda secara sosia ekonomi. Kota baru merupakan unsur penting bagi kolonialisasi bangsa Yunani dan romawi kuno. Benteng – benteng renesans didirikan dengan maksud untuk pertahanan pada daerah – daerah perbatasan, 30 buah di bangun di Prancis pada masa pemerintahan raja Edward I dari Inggris, yaitu selama periode Ketika Inggris menguasai Sebagian dari Prancis pada tahun 1298, Raja Edward I menulis dari tempat istirahatnya di London : "empat orang yng memiliki kecakapan merencanakan sebuah kota baru, yang paling pandai dan mampu, yang paling tahu bagaimana memisahkan, menyusun dan mengatur kota baru, sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan bagi kita dan para pedagang dan yang siap bersedia ditugaskan kemanapun kita mengirim. (Adams, 1935)

Ungkapan fisik untuk gerakan yang bersifat kelompok dan keagamaan dapat dilihat pada beberapa kota yang tumbuh di

sekitar tempat suci dan membentuk komunitas “impian”. Untuk sebuah pengembangan selanjutnya diperlukan ke daerah sekitarnya, pada awalnya kita membutuhkan kota baru untuk pekerjaan konstruksi dan untuk tenaga operasional. Kita dapat melihat bahwa terbentuknya kota baru di beberapa negara adalah substitusi bagian dari kebijaksanaan nasional berkaitan dengan penduduk, pertahanan nasional dan Pembangunan regional. Dapat kita lihat pada pengembangan kota baru IKN di bangun sebagai ibu kota negara selain factor kota negara banyak fungsi lain yang mengikuti substitusi dari IKN yang membentuk gambaran kota baru step by step dari BAPENNAS sendiri ada 3 tahapan dalam Pembangunan IKN Ddan berjalan hingga 2045 fase pertama pertama di mana ini difokuskan kepada sarana utama. Yakni istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan dari ASN, TNI dan Polri, kemudian dilanjutkan tahap ke dua seluruh infrastruktur dan ekosistem yang dicakup dalam IKN nantinya akan terkoneksi dengan kota-kota terdekat dan tahap ketiga melanjutkan kemajuannya meningkatkan status sebagai livable city, smart city dan green city.

Penggambaran di atas bahwa pembentukan kota kota baru di bangun sebagai pusat baik sebagai ibu kota negara, pusat wilayah penampungan Masyarakat pensiun, atau tempat rekreasi, sebagai pusat penelitian atau Pendidikan, Gudang peletakan peluru kendali bawah tanah yang terletak jauh dari pusat kota dan hal lain yang sesuai dengan kelanjutan pengembangan kota ke tahap selanjutnya.

Sebuah kota baru yang dikenal saat ini adalah sebuah komunitas dengan ukuran ukuran atau luas tertentu, yang sebelumnya direncanakan secara menyeluruh, dan dilengkapi dengan beberapa modifikasi yang memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Focus dari kota pada satu tujuan misalnya sebagai pendukung produksi atau kegiatan rekreasi dan lainnya. Sebuah kota baru dengan kota Tunggal berbeda dengan dengan pembagian persil untuk permukiman dengan dasar ekonomi di dalam sebuah komunitas.

Keragaman kota baru melibatkan sejumlah kegiatan ekonomi yang menyediakan lapangan kerja untuk penduduk setempat, semua kategori utama penggunaan lahan, unsur – unsur dan fasilitas yang ada dikota tua yang ada. Departemen of Housing and Urban Development (HUD) atau departemen perumahan dan Pembangunan kota di amerika serikat, telah berusaha tapi tidak berhasil untuk memberikan kemungkinan bagi Perusahaan pribadi untuk menciptakan kebaruan dalam komunitas, dengan menyediakan jaminan untuk menciptakan keragaman komunitas, dengan menyediakan jaminan untuk mendapatkan pinjaman guna pembelian tanah dan memberkan bantuan untuk mendukung perencanaan lebih lanjut. Perencanaan, Pembangunan dan pelaksanaan suatu kota baru di lakukan oleh satu sistem agar terbentuk kordinasi, tujuan, dan waktu Pembangunan kota yang cepat.

Pada kota baru dengan fungsi Tunggal maupun multi sejumlah besar dana yang dibutuhkan dialokasikan pada tahap pertama modal ini di butuhkan membiayai prasarana transportasi, utilitas, pengawasan, sistem dan fasilitas pelayanan jika kota di fungsikan. Terdapat perbedaan – perbedaan yang jelas antara perencanaan kota baru dan kota yang sudah ada pada perencanaan kota baru jauh lebih mudah dilakukan. Perencanaan kota komprehensif disusun pada bagian awal oleh satu institusi yang bertugas mengendalikan pengembangan hingga kota baru tersebut selesai. Diperlukan penerapan rekayasa yang tepat mempertimbangkan keterkaitan terhadap biaya pemasangan dan efesiensi pengeporasian dan dibangun di atas persil lahan yang di perhitungkan antara jumlah penduduk direncanakan.

Sebuah kotamadya yang ada terdiri dari atas ribuan persil yang terpisah dengan berbagai tujuan yang berbeda untuk mencapai satu dalam perencanaan kota. Hak – hak yang didasarkan atas undang – undang, kepentingan yang telah mandarah daging , serta bentuk pola politik dan kebudayaan yang sudah lama harus tidak kaku namun berkaitan dengan cara pelaksanaanya dan ruang

harus keputusan yang diambil dalam jangka waktu yang lama karena berurusan dengan proses politik dan birokrasi yang berkepanjangan di balai kota dan pada pusat kekuatan non pemerintah didalam lingkup komunitas.

Rencana induk kota – kota baru diwujudkan secara menyeluruh didalam kota yang telah dikembangkan, kecuali penyesuaian yang disebabkan oleh kondisi tapak, perubahan kebutuhan pasar atau pilihan rumah oleh calon penduduk kota baru. , atau dapat pula disebabkan perkembangan politik dan ekonomi disekitarnya. Proses penyusunan rencana induk kota baru melibatkan lebih sedikit variable dan faktor – faktor yang tidak di perhitungkan. Penyajian analitis yang terpadu untuk suatu komunitas tersebut dapat meliputi juga laporan keuangan, jadwal dan proses kontruksi dan kebutuhan pasar pada fasilitas perumahan, komersial, dan industri. Sebuah permodelam bentuk atau fisik pada sebuah kota baru dapat menunjukkan gambar keadaan eksisting yang diusulkan, sistem prasarana fisik dan unsur lingkungan lainnya. Untuk melakukan percobaan bentuk kota baru jenis dan tata letak perumahan, pengembangan daerah komersial, dan pemasangan utilitas dapat dilakukan pada bagian tertentu kota baru sebelum di terapkan.

Kota – kota baru diseluruh dunia memiliki berbagai ragam bentuk spasial dan mengabungkan berbagai unsur tergantung pada keadaan. Salah satu jenis kota baru yang menunjukkan karakter khas yang berada di Inggris, yang memperkenalkan istilah *green belt towns* atau kota bersabuk jalur hijau didalam perencanaan kota. Selama 50 tahun Inggris memproduksi lebih dari 30 kota – kota baru yang dikelilingi oleh jalr hijau dan tanah terbuka yag ditetapkan sebagai pertanian, wisata, atau fungsi lainnya dimana perbandingan lahan open space lebih banyak di bandingkan building space, awal mulanya kota ini dibangun untk menampung 30.000 penduduk namun seiring pertumbuhan rencana perkembangan penduduk menjadi 150.000 orang atau lebih. Sehingga di butuhkan dukungan dari komunitas yang lebih baik,

keseimbangan antara ekonomi dan budaya. Kota - kota baru berkarakter sebagai kota bersabuk jalur hijau menunjukkan banyak karakter umum sebagaimana terlihat pada gambar 22 di bawah ini

Transportasi

- * Situasi: terletak di sepanjang jalur kereta api, pada inti pertumbuhan regional, pada atau dekat dengan pertemuan antar jalur-jalur utama jalan raya, atau memiliki pencapaian yang mudah terhadap sumberdaya alam bila kota baru akan merupakan kegiatan ekonomi utama selama tahap-tahap awal pembentukan komunitas.
- * Sistem jaringan jalan utama dan sekunder ditetapkan dan dibedakan secara jelas.
- * Pengurangan secara seimbang jalur-jalur jalan yang digunakan hanya untuk sekedar lewat, kecuali jalur jalan yang benar-benar merupakan bagian dari sistem utama dan sekunder.
- * Penggunaan rancangan "superblok" dan pola "jalan buntu" dan "semi melingkar" secara meluas pada jalan-jalan dengan panjang terbatas di lingkungan permukiman; tidak terdapat sirkulasi lalu lintas primer dan sekunder melewati permukiman.
- * Jalan utama menggunakan pola kurvalinier dengan menghindari kesamaan-kesamaan pola rektilinier yang kaku, tetapi tetap menunjukkan bentuk rektanguler untuk memberikan orientasi bagi pengemudi.
- * Penerapan sistem jalur khusus untuk pengendara sepeda di seluruh bagian kota.
- * Pemisahan antara kendaraan bermotor roda empat atau mobil dan jenis-jenis kendaraan lainnya dan sirkulasi pejalan kaki.
- * Sistem lalu lintas yang "mengalir bebas" dengan sesedikit mungkin lampu dan tanda pengatur.
- * Penyediaan sistem bus angkutan umum yang melayani seluruh bagian kota.
- * Penggunaan jalur arteri untuk memberikan batas secara spasial "lingkungan permukiman" dan "desa" bila keduanya merupakan bagian dari rencana kota.
- * Jalur pejalan kaki/pengendara sepeda di dalam lingkungan permukiman (terpisah dari sistem jaringan jalan sekunder) yang menghubungkan lingkungan permukiman dengan pusat perbelanjaan di tingkat kota, lingkungan, atau desa, serta fasilitas-fasilitas lainnya.
- * Penyediaan tempat parkir untuk sepeda/kendaraan lainnya di semua fasilitas komersial yang memerlukan tempat parkir.
- * Tempat parkir dalam bentuk kelompok lebih diutamakan daripada penyediaan secara individual oleh masing-masing unit rumah (hal ini bukan merupakan karakteristik yang umumnya dijumpai pada kota-kota baru di Amerika Serikat).
- * Perlu dibuat jalur "by-pass" untuk lalu lintas yang menghendaki jalan pintas daripada harus membebani kota.
- * Penggunaan tandan dan simbol lalu lintas yang berlaku secara internasional sehingga tidak perlu pemahaman khusus tentang bahasa setempat.
- * Pemilihan peralatan pengatur lalu lintas dan perlengkapan jalan yang sesuai dengan dirancang dengan baik (lampu pengatur lalu lintas, tanda-tanda, pemisah jalan, pagar-pagar, tempat sampah, dan lain-lain)

Gambar 22A-2
Karakter umum Kota-kota Baru
 Bentuk/Rancangan Ruang Secara Menyeluruh, Transportasi
 Disajikan atas seizin kota-kota(Butterworths, Guilford)

Bentuk/Rancangan Spasial secara keseluruhan

- * Penentuan sejak awal jumlah penduduk, luas lahan perkotaan dan kepadatan berbagai penggunaan lahan.
- * Bila dianggap layak, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan bagi kehidupan perkotaan yang seimbang, ditetapkan dengan ukuran yang memadai untuk mendukung cakupan kegiatan sosial dan kebudayaan.
- * Jaringan jalan raya yang berpola radial-konsentris (kadang-kadang diatur membentuk empat persegi panjang tanpa meninggalkan ciri radial-konsentrisnya).
- * Lingkungan permukiman dan desa-desa yang berpola "Seluler" terbentuk oleh sistem jaringan jalan sekunder dan suatu sistem "interior" yang berupa rangkaian koridor terbuka yang terdiri atas jalur pejalan kaki dan pengendara sepeda, yang terpisah dari jalan melalui pembedaan ketinggian.
Setiap ruang yang didefinisikan sebagai "sel" permukiman dimaksudkan untuk menampung penduduk yang telah ditentukan, dengan berbagai ragam perumahan dan kepadatan.

- * Suatu jalur hijau "eksternal" yang berupa lahan terbuka dengan fungsi pertanian atau rekreasi mencakup daerah terbangun pada kota baru (atau penggantian lahan dengan luas yang kira-kira sama yang berupa jalur hijau "internal" yang memisahkan lingkungan permukiman/desa-desa).
- * Pusat kegiatan kota yang berlokasi benar-benar di pusat, terdiri atas kegiatan/fasilitas pemerintahan, masyarakat, komersial, dan kultural.
- * Pusat perdagangan di tingkat lingkungan atau desa dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dipilih dan ditentukan ukurannya sesuai dengan potensi penduduk yang didukung.
- * Penggunaan secara ekstensif lansekap pada ruang-ruang terbuka dan seluruh bagian kota.
- * Preservasi potensi keindahan dan sumberdaya alam lainnya yang terdapat di tapak.
- * Rancangan dan rekayasa arsitektural yang harmonis di berbagai kawasan, fasilitas dan perlengkapan jalan.
- * Perlu dilibatkan seni di ruang-ruang umum (patung, mosaik, dan lain-lain).

Gambar 22A-1

Karakter umum Kota-kota Baru

Bentuk/Rancangan Ruang Secara Menyeluruh, Transportasi
Disajikan atas seizin kota-kota(Butterworths, Guilford)

Yang terlihat tidak hanya sekedar suatu jalur yang terbentuk oleh open space, tetapi juga ruang – ruang yang disediakan didalam kota sebagai lansekap disepanjang jalan utama dan sejajaran tepian Sungai, taman kota, lapangan golf, tempat rekreasi, lahan – lahan yang fasif. Hal tersebut merupakan kasus kota baru yang dikembangkan oleh Perusahaan swasta sebagaimana terlihat pada gambar 33

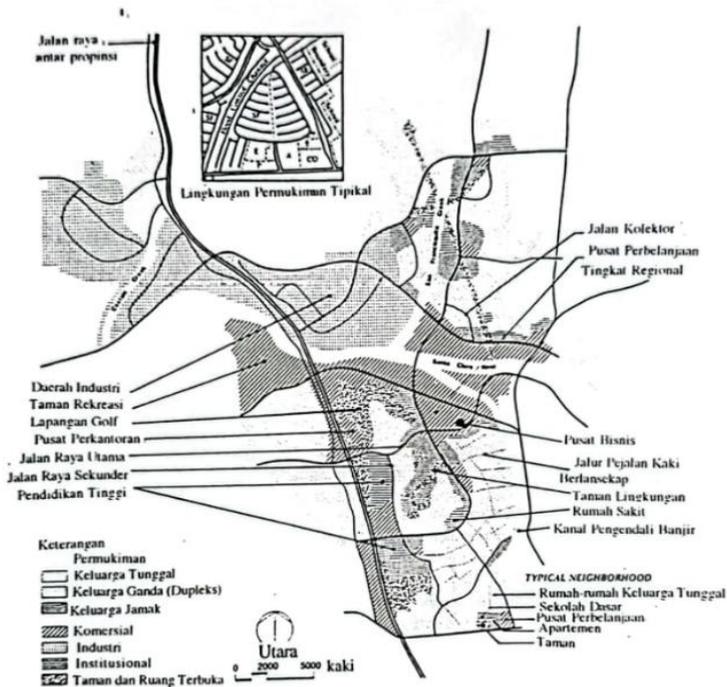


Gambar 23 A
Sebuah Kota Baru
(Valencia, California)

Foto udara: menunjukkan area kota baru yang sedang mencapai 25 persen pembangunannya, tanah pertanian, dan tanah kosong untuk dibangun, dan guna lahan di sekitarnya.

Foto inset: menunjukkan jalan-jalan buntu (cul-de-sac) yang paralel di lingkungan permukiman, yang berakhir pada jalur pedestrian (paseo) yang mengarahkan menuju pusat perbelanjaan lokal, sekolah dasar, dan apartemen.

Disajikan atas seizin Valencia Company.



Gambar 23 B
Sebuah Kota Baru
(Valencia, California)

Rencana Induk Penggunaan Lahan pembangunan yang sedang dilaksanakan, 17.000 penduduk dan pembangunan yang direncanakan untuk menampung 61.000 jiwa.
Foto inset: perbesaran sistem jaringan jalan dan penggunaan lahan di daerah permukiman yang tipikal.

Disajikan atas seizin Valencia Company.

Hanya di amerika serikat beberapa kota baru dengan diservkasi fungsi berhasil dikembangkan oleh Perusahaan swasta. Bila kebijaksanaan umum mengizinkan adanya pihak sponsor maka pelaksanaan Pembangunan swasta menguasai lahan yang cukup luas, sedangkan sangat jarang dijumpai pelaksana Pembangunan yang memiliki lokasi cukup luas untuk komunitas baru, akan tetapi persil – persil yang ada didekatnya dapat yang masih dimiliki orang lain dapat dimiliki dengan lelang atau pasar terbuka. Dengan

demikian fungsi dan arah pengembangan harus dijaga kerahasiannya sehingga seluruh bagian tanah ternemtu, karena terjadi lonjakan harga sehingga nilai tanah tidak terjangkau. Untuk pengembang bagian kota yang bersifat individu, pemerintah tingkat lokal akan memberikan suatu pemberian hak tanggung jawab pembebasan tanah kepada pihak swasta. Dengan suatu visi membentuk kota baru. Atau mendapatkan tanah itu sendiri dan pada tagging jawab pengendalian kepada pihak swasta dalam waktu tertentu. Di negara amerika sendiri membentuk otoritas khusus untukmendapatkan tanah melalui eminent doint atau wewenang untuk mengambil hak pemilikan tanah, perencanaan dan mengatur kontruksi kota baru dalam hal ini tetap melibatkan perorangan dan Ketika proses Pembangunan kota baru berakhir pelaksanaan Pembangunan di lanjutkan oleh pemerintah kota.

Dua hal yang akan terbentuk pada suatu komunitas baru apakah akan membentuk kota baru ataukah pemukiman liar. Contoh pertama kita dapat melihat pada peremajaan kota atau mendirikan Kembali area pusat kota dengan memasukkan kegiatan industry, permukiman dan komersial. Suatu proses industry dilibatkan dalam suatu peremejaan kota makan akan tercipta lapangan kerja bagi Masyarakat disekitar, maka secara Pembangunan akan lebih karena pajak pendapatan yang terkumpul dipergunakan Kembali untuk kebutuhan kotamadya. Akan terasa susah untuk mengajak induatri terlibat di bagian yang negative pada pusat kota dan akan lebih sulit untuk menarik Perusahaan baru untuk berkegiatan pada suatu Kawasan kota yang rusak ancaman keselamatan penduduk dan lahan kita bisa lihat pada pusat kota Jakarta terpapar akan polusi udara dan macet karena pengaturan sistem jalur dan kepadatan penduduk sehingga akan membentuk kerusakan pada pusat kota pilihan selanjutnya adalah memisahkan fungsi pemerintahan ke kota baru pertanyaan selanjutnya apakah dapat dipisahkan industry dan pusat pemerintahan ?

Pemukiman liar sering kita dapati pada kota besar permukiman ini adalah lahan yang mewadahi Sebagian besar penduduk kota dan bagaikan sel jaringan akan terus berkembang seiring fenomena apakah dapat bersifat endemic beberapa tahun. Permukiman liar ini adalah suatu termasuk bagian dari suatu kota baru karena semua elemen infrastruktur yang digunakan dapat bersifat sementara. Memang 2 hal yang bertolak belakang dan kombinasi yang tidak sepadan dengan suatu konsep penataan yang teratur. Dengan tetap adanya industri ada permukiman liar ini terbentuk karena adanya industri yang bersifat perumahan perseorangan dan hal itu tidak terkontrol maka muncul komunitas permanen yang menggunakan lahan secara tidak sah sudah tentu karena sifatnya mendadak tidak tertata sistem maka beberapa sistem struktur kota didalamnya akan ikut tidak tertata seperti jalur utilitas, transportasi dan lainnya. Konsep pengembangan permukiman liar ini merupakan hal bagian tubuh akan menjadi tumor pada tubuh dia akan merusak sistem jaringan saraf pada tubuh, begitu juga permukiman liar bila terus tumbuh akan merusak sistem struktur pada kota yang sudah teratur karena tidak adanya jalur yang terhubung.

Perencanaan kota baru tentu akan terhubung dan tersubkordinasi dengan kota yang sudah terbangun dalam beberapa bagian. Perencanaan Metropolitan dan kota baru adalah kerkaitan metropolitan sebagai makro dan kota baru sebagai sub bagiannya. Beberapa wilayah di eropa menyusun struktur ruang daerah perkotaan kedalam pusat kota dan kota - kota baru yang melingkup disekitarnya. 2 elemen struktur tersebut terpisah pusat kota dan kota baru dan terwadahi dalam sebuah ruang terbuka yang berfungsi untuk menmbatasi perluasan yang tidak terkendali . pertumbuhan penduduk dimulai dari pusat kota kemudian ke kota - kota baru.

Kota - kota lama dalam arti yang tumbuh lebih awal adalah penentuan keinginan - keinginan dari awal terbentuknya sebuah yang merupakan hasil perkembangan pertumbuhan kota - kota

baru yang di capai step by step dalam kurung waktu beberapa tahun. Kota – kota lama juga menggunakan rancangan baru metode kontruksi, jenis unit rumah tinggal, dll semua itu di uji dikota baru.

DAFTAR PUSTAKA

- F Adams, Thomas, *Outline of Town and City Planning*, New York (Russel Sage), 1935, p. 88.
- Branch, Melville C., "*Common Characteristics of New Towns*," *Cities* (Butterworths, Guilford), November 1983, pp. 148-149.
- Melville C branch. 1995. *Comprehensive city planning introduction and eksplanation* .chicago, usa: Penerbit American planning association .
- Abrams, Charles, *Squatter Settlements, The Problems and the Opportunity*, Washington, DC (Department of Housing and Urban Development), April 1966, 48 pp.
- Burby, Raymond J., III dan Shirley F. Weiss, *New Communities U.S.A.*, Lexington, MA (Heath), 1976, 593 pp.

BIODATA PENULIS



Ar. Nurmiah. ST.,M.Sc

Dosen Arsitektur

Fakultas Teknik Dan Perencanaan Universitas Pohuwato

Penulis lahir di masohi tanggal 10 mei 1982 . Penulis adalah dosen pada Program Studi arsitektur fakultas Teknik dan perencanaan universitas Pohuwato. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan arsitektur di universitas muslim Indonesia dan melanjutkan S2 pada Tahun 2018 di magister desain Kawasan binaan Universitas Gadjah Mada

Penulis menekuni bidang Penelitian behavioral mapping diantaranya penelitian yang sudah ada, Persepsi pengunjung terhadap visual fungsional kawasan pasca revitalisasi, Optimalisasi penataan untuk peningkatan Sense Of Place pada Kawasan Jembatan Nagit Marisa persepsi masyarakat terhadap tingkat kenyamanan visual permukiman nelayan studi kasus permukiman nelayan lette makassar

